



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Iin Maelani, S. Kom	Penyusun Bahan Rencana dan Pelaporan		
2.	Diperiksa	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha		
3.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha		
4.	Disetujui	M. Fajar Qomaru Zaman, S.Si.T., M. Sc	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan		
5.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Plt Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan		
6.	Disetujui	Dwi Hary Yulisetianto, S.Si.T., M. Sc	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan		



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M. Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M. Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Banjar, November 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK 2 Meningkatnya konektivitas transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6
2	SK 3 Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	1
3	SK 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintas	1
	SK 7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	1
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	7
4	SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Tahun	1
		IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Tahun	1
5	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	2
		IKK 9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	2
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	2
6	SK 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	20

		bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12
7	SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	WL : 15 Guardrail : 228m
8	SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	350
9	SK 4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4
			IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
			IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2
			IKK 4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
			IKK 4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
			IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
			IKK 4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5
			IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
			IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
			IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12
			IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1
			IKK 4.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi hukum	Kegiatan	1

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 11.060.228.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 3.784.935.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 34.275.394.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 14.396.560.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.417.370.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 16.017.026.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Banjar, November 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M. Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka mengakibatkan disesuaikan kembali Perjanjian kinerja pada bulan November Tahun 2025 dan penyesuaian anggaran berdasarkan Revisi 12 DIPA Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2025 tanggal 11 November 2025.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dengan Total Anggaran Rp85.951.513.000,-

TABEL PIC
REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK 2 Meningkatkan konektivitas transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	Seksi Sarana
2	SK 3 Meningkatkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	1	Seksi Prasarana
3	SK 5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintas	1	Seksi Sarana
	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	1	Seksi Prasarana
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun/unit /lokasi 2	1	Seksi Prasarana
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	7	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
4	SK 8 Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Tahun	1	Seksi Prasarana
		IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Tahun	1	Seksi Prasarana
5	SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	2	Seksi Lalin

	Penumpang dan Barang	IKK 9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	2	Seksi Lalin
		IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	2	Seksi Prasarana
6	SK 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	20	Seksi Sarana
		IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12	Seksi Sarana
7	SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	WL : 15 Guadrail : 228m	Seksi Lalin
8	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	350	Seksi Sarana
9	SK 4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	10	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5	Subbag Tata Usaha

		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi hukum	Kegiatan	1	Subbag Tata Usaha

